

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KINERJA
MANAJERIAL DAN PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

LUSIANA KANJI

(Dosen Tetap STIEM Bongaya)

ABSTRAK. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, dan pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran baik secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.*

Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 37 pegawai Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang. Hasil kuesioner tersebut telah diuji validitas dan reliabilitasnya, juga telah diuji asumsi klasik berupa asumsi normalitas dan asumsi heterokedastisitasnya. Metode analisis data menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena menunjukkan hasil uji hipotesis yang positif dan signifikan. Kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, Pelaporan/pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.

Kata kunci : *Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Akuntabilitas Kinerja*

PENDAHULUAN

Latar Belakang. Pengelolaan pemerintahan daerah yang akuntabel, tidak bisa lepas dari pengelolaan APBD. Dalam pengelolaan sumber daya diperlukan Anggaran (APBD) untuk mengalokasikan sumber-sumber pendapatan dan belanja sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya tersebut.

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi, Bastian (2006:171). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan

umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang, Bastian (2006: 275). Konsep penganggaran berbasis kinerja menuntut adanya keterkaitan antara anggaran dengan kinerja.

Pengelolaan pemerintah daerah secara akuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009), bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Sejalan dengan semangat akuntabilitas dan transparansi dalam rangka reformasi pengelolaan keuangan pemerintah, dorongan terhadap kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintahan juga meningkat. Pengukuran kinerja ini diperlukan sebagai informasi mengenai manfaat yang diberikan dari jasa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Kabupaten Enrekang.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012), dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare) menunjukkan hasil bahwa perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Haspiarti (2012). Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian Haspiarti adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada tempat yang berbeda, waktu dan responden yang digunakan.

Rumusan Masalah. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Apakah kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
3. Apakah pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran, kinerja, dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Anggaran

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Di mana anggaran disusun untuk jangka waktu satu tahun. Kenis (1979) menyatakan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif, penyusunan anggaran dan penerapannya harus memperhatikan 5 dimensi Karakteristik Tujuan Anggaran yaitu: (1) Partisipasi Anggaran, (2) Kejelasan Anggaran, (3) Umpan balik Anggaran, (4) Evaluasi Anggaran, dan (5) Kesulitan Tujuan Anggaran.

Anggaran sebagai rencana operasional yang dinyatakan dalam satuan uang dari suatu organisasi dimana disuatu pihak menggambarkan perkiraan biaya (pengeluaran) dan dipihak lain menggambarkan perkiraan pendapatan (penerimaan) guna menutupi pengeluaran tersebut, untuk suatu periode tertentu yang umumnya satu tahun.

Adapun anggaran yang digunakan oleh suatu daerah bersumber dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PerMendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 22 Ayat 1). Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran dapat diketahui dari beberapa fungsinya yaitu :

1. Instrumen Politik. Anggaran adalah salah satu instrumen formal yang mewujudkan *bargain* eksekutif dengan tuntutan kebutuhan publik yang diwakili oleh legislatif.
2. Instrumen Kebijakan Fiskal. Dengan mengubah prioritas yang besarnya alokasi dana, anggaran dapat digunakan untuk mendorong memberikan fasilitas dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasilnya.
3. Instrumen Perencanaan. Di dalam anggaran disebutkan tujuan yang ingin dicapai, biaya dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan pada masing-masing unit kerja.
4. Instrumen Pengendalian. Dalam anggaran berisi rencana penerimaan dan pengeluaran secara riil setiap unit kerja (Said Herry Syafrizal dan Cut Aknawal, 2011).

Komitmen dalam organisasi dapat diartikan sebagai dimensi perilaku yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan para pegawai untuk bertahan pada suatu instansi kerja. Definisi komitmen aparat adalah proses

pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi. Di samping itu, komitmen aparat mengandung pengertian sebagai sesuatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen aparat menyiratkan hubungan pegawai dengan instansi kerja atau organisasi secara aktif. Karena pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempat bekerja.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan Kepala Bagian Umum dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian. Kinerja merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan staf, negosiasi dan representasi.

Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. (Mardiasmo, 2009: 62).

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiscal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik (Mardiasmo, 2009: 63)

APBD pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus di susun dalam struktur organisasi yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Dengan kata lain, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Kesenjangan Anggaran (*Budgetry Slack*)

Menurut Young (2001) dalam Firdaus A. Rahman (2009) senjangan anggaran didefinisikan sebagai tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktifnya ketidak diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya. Sedangkan Antony dan Govindarajan (1998) dalam Firdaus A. Rahman (2009) mendefinikasikan senjangan anggaran sebagai

perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik perusahaan.

Hansen dan Mowen (2004) dalam Firdaus A. Rahman (2009) menyatakan senjangan timbul bila manajer sengaja menetapkan terlalu rendah pendapatan atau menetapkan terlalu besar biaya. Hal ini tentu saja menguntungkan manajer tersebut, karena disuatu sisi akan mengakibatkan tingginya kemungkinan manajer memenuhi anggaran yang dibuat, kemudian di sisi lain menurunkan resiko yang akan dihadapinya, sehingga prestasi manajer tersebut akan meningkat karena tercapainya target yang telah dianggarkan.

Di lingkup Pemerintah Daerah senjangan anggaran adalah perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik bagi pemerintah (Firdaus A. Rahman, 2009). Terjadinya senjangan anggaran di pemerintah daerah, disebabkan oleh tindakan bawahan yang mementingkan keuntungan pribadi yang memberikan suatu estimasi tidak baik bagi pemerintah. Hal ini menyebabkan perbedaan antara anggaran yang di laporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik bagi organisasi. Prestasi kerja seorang pemimpin dalam konteks pemerintah cenderung dinilai dari prestasinya dalam mencapai anggaran yang telah di tetapkan.

Hilton dalam Firdaus A. Rahman (2009) menyatakan tiga alasan utama manajer melakukan *slack* anggaran:

1. Orang-orang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus di mata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya.
2. Slack anggaran selalu digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang terjadi manajer tersebut dapat melampaui/mencapai anggarannya.
3. Rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya.

Sedangkan menurut Chow et al dalam Firdaus A. Rahman (2009) senjangan anggaran merupakan perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan yang dilaporkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa senjangan anggaran adalah tindakan yang dilakukan bawahan untuk mengecilkan kapasitas produktifnya dalam anggaran yang disusunnya, sehingga ada ketidak sesuaian dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak tercipta suatu anggaran yang lebih objektif dan maksimal.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Halim dalam Herawaty (2012), Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam

rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2009:63), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik. Bastian dalam Herawati (2011), penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan: (1) berdasarkan program, (2) berdasarkan pusat pertanggungjawaban dan (3) sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan, Haspiarti (2012).

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, Riantiarno & Azlina (2011).

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran mencakup luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah serta mudah di pahami oleh siapa saja yang bertanggungjawab. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang di susun dengan estimasi terbaik bagi organisasi. Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya anggaran yang di nyatakan secara jelas dan spesifik, dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. (Kenis,1979 dalam Firdaus A. Rahman, 2009).

Teori yang dikemukakan Bastian (2006: 255) dalam menentukan kejelasan sasaran anggaran tersebut telah di susun Kepala daerah berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan menteri dalam negeri setiap tahun menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Kebijakan umum APBD yang

selanjutnya disingkat KUA (kebijakan umum APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan dibidang pendapatan, belanja dan pendanaannya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Formulasi kebijakan anggaran harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran akan dicapai di tahun yang akan datang dan sekaligus juga, harus menjadi acuan bagi proses pertanggungjawaban (LPJ) kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran, karena bersifat teknis, prosesi ini di serahkan kepada pemerintah daerah. penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah di tetapkan dalam rencana strtegis (Renstra).

Setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Adanya pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat diketahui kinerja suatu organisasi, Herawaty (2012).

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian yang tepat. Pergeseran sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi didukung oleh UU Otonomi Daerah yang terdiri dari UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberlakukan sejak Januari 2001. Menurut Gordon dan Miller (1976) dalam Nazaruddin (1998) berpendapat, desentralisasi itu dibutuhkan karena adanya kondisi administratif yang semakin kompleks. Begitu pula tugas dan tanggungjawab, sehingga perlu pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah, Herawaty (2011).

Menurut Locke dan Latham (1990) agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan:

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.
3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi (Putra, 2013).

Menurut Abdullah (2005) tujuan atau sasaran APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria berikut:

1. Spesifik, sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus dapat memberikan inspirasi kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.

2. Terukur, sasaran harus dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.
3. Menantang tapi realistis, sasaran harus menantang untuk di capai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk di capai.
4. Berorientasi pada hasil akhir, sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya
5. Memiliki batas waktu, sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan di capai.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan Kepala Bagian Umum dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Bentuk dan isi laporan kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait, ilustrasi format laporan kinerja yang diatur menurut Peraturan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006.

Kinerja merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan staf, negosiasi dan representasi (Said Herry Syafrizal & Cut Aknawal, 2011).

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer yang memimpin unitnya akan melibatkan kombinasi dari beberapa fungsi manajerial di atas. Oleh karena itu, untuk membangun suatu kinerja manajerial yang efektif maka diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman atas fungsi-fungsi manajerial serta peningkatan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan fungsi manajerial tersebut (Said Herry Syafrizal & Cut Aknawal, 2011).

Kinerja jika dilihat dari bahasa artinya adalah *performance* yang berarti prestasi. Jadi kinerja merupakan prestasi kerja seorang pegawai. Menurut Mahsun (2006), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi, Putra (2013).

Menurut Mahoney *et. al* (1963) dalam Putra (2013) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator :

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.
5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menagani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.
6. Pemilihan Staff, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.
7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain, Putra (2013).

Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, Herawaty (2011).

Proses pertanggungjawaban anggaran diawali dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, *pertama*; relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value*, *predictive value*, tepat waktu dan lengkap; *kedua* andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, *variability*, netralitas; *ketiga* dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain dan *keempat* dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, Andriani dan Hatta (2011).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup :

- a. Laporan realisasi anggaran SKPD
- b. Neraca SKPD
- c. Laporan Arus Kas, dan
- d. Catatan atas laporan keuangan SKPD.

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan studi kasualitas

Tempat dan Waktu Penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2013.

Populasi dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang sebanyak 37 orang. penarikan sampelnya menggunakan sampel jenuh (sensus) yaitu sama dengan jumlah populasi, yakni 37 pegawai sebagai responden

D. Metode Pengumpulan Data

Jenis dan Sumber Data. Jenis data data penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data tersebut bersumber dari dokumentasi dan hasil penyebaran qesioner

F. Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif menjelaskan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Analisis Inferensial. Digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Berikut ini metode yang digunakan peneliti dalam analisis inferensial:
 - a. Uji Instrumen
 - 1) Uji Validitas,
 - 2) Uji Reliabilitas (*Test of Reliabilitas*)
 - b. Uji Asumsi Klasik
 - 1) Uji Normalitas,
 - 2) Uji Multikolinearitas,
 - 3) Uji Heteroskedastisitas.
 - c. Uji Hipotesis
 - 1) Analisis Regresi Berganda

$$Y = \beta_0 + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

X₁ = Kejelasan Sasaran Anggaran

X₂ = Kinerja Manajerial

X₃ = Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = Error term.

2) Uji statistik (uji t)

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah:

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan:

n = jumlah data

r = koefisien korelasi.

Langkah-langkah uji hipotesis:

H₀ : t < 0: menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

H₁ : t > 0: menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria Keputusannya adalah :

- a) Jika $t_{hitung} > t_{table}$, dan $sig < 0,05$ maka H₀ ditolak dan H_a diterima.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{table}$, dan $sig > 0,05$ maka H₀ diterima dan H_a ditolak.

- c) Taraf signifikan = 5 %
 d) Derajat kebebasan (df) = n – 3.
 3) Uji F,
 Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / N-k}$$

Di mana:

R^2 = Koefisien determinasi

N = Banyaknya sampel (observasi)

K = Banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta.

Kriteria Pengujian:

- a) Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima. Artinya semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%.
 b) Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Artinya semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada taraf signifikansi 5%.

Untuk mempermudah perhitungan dan pengujian statistik, maka digunakan program SPSS Versi 21.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengujian

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = n - 2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini (n) = 37 dan besarnya df dapat dihitung $37 - 2 = 35$, sehingga didapat nilai *r tabel dua sisi sebesar 0,363*. Item-item tersebut jika mempunyai nilai validitas > dari 0,363 maka item-item tersebut dikatakan valid. Dalam penelitian ini kevalidan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Validitas Variabel X_1 (Kejelasan Sasaran Anggaran)

| Item Pernyataan | R_{hitung} | Keterangan |
|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 0,863 | Valid |
| 2 | 0,660 | Valid |
| 3 | 0,551 | Valid |
| 4 | 0,463 | Valid |
| 5 | 0,380 | Valid |
| 6 | 0,501 | Valid |
| 7 | 0,399 | Valid |

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Tabel 6. menyajikan tujuh item pernyataan dalam variabel

kejelasan sasaran anggaran (X_1) di mana semua item pernyataan valid.

Tabel 2. Uji Validitas Variabel X_2 (Kinerja Manajerial)

| Item Pernyataan | R_{hitung} | Keterangan |
|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 0,637 | Valid |
| 2 | 0,780 | Valid |
| 3 | 0,562 | Valid |
| 4 | 0,432 | Valid |
| 5 | 0,570 | Valid |
| 6 | 0,588 | Valid |
| 7 | 0,743 | Valid |
| 8 | 0,589 | Valid |

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Tabel 2 menyajikan delapan item pernyataan dalam variabel kinerja manajerial (X_2) di mana semua item pernyataan valid.

Tabel 3. Uji Validitas Variabel X_3 (Pelaporan/Pertanggung-jawaban).

| Item Pernyataan | R_{hitung} | Keterangan |
|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 0,614 | Valid |
| 2 | 0,703 | Valid |
| 3 | 0,487 | Valid |
| 4 | 0,451 | Valid |

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Tabel 3 menyajikan tiga item pernyataan dalam variabel pelaporan/pertanggungjawaban (X_3) di mana semua item pernyataan valid.

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Y (Akuntabilitas Kinerja)

| Item Pernyataan | R_{hitung} | Keterangan |
|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 0,510 | Valid |
| 2 | 0,830 | Valid |
| 3 | 0,437 | Valid |
| 4 | 0,929 | Valid |

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Tabel 4 menyajikan empat item pernyataan dalam variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y) di mana semua item pernyataan valid.

b. Uji Reliabilitas

Sedangkan jika variabel-variabel tersebut mempunyai *cronbach's alpha* (α) > 0,60, maka variabel tersebut dikatakan reliabel. Dalam penelitian ini kereliabelan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Reliabilitas Variabel X₁, X₂, X₃, dan Y

| Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|--|------------------|------------|
| Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁) | 0,837 | Reliabel |
| Kinerja Manajerial (X ₂) | 0,756 | Reliabel |
| Pelaporan/Pertanggungjawaban (X ₃) | 0,701 | Reliabel |
| Akuntabilitas Kinerja (Y) | 0,822 | Reliabel |

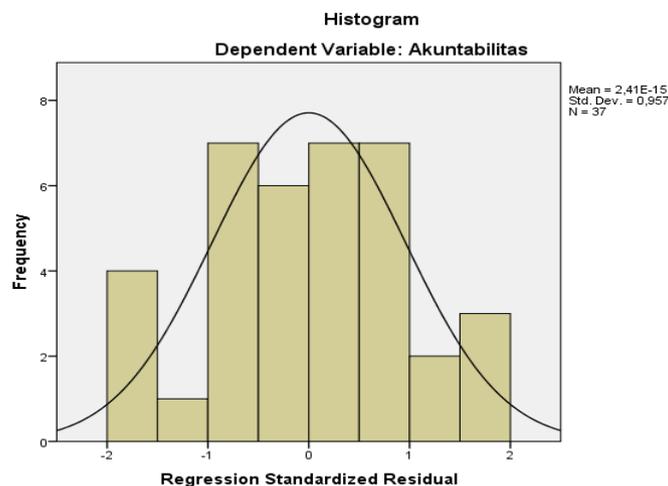
Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Tabel 5 menyajikan pernyataan dalam masing-masing variabel diantaranya Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁), Kinerja Manajerial (X₂), Pelaporan/Pertanggungjawaban (X₃), dan Akuntabilitas Kinerja (Y) adalah reliable.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilihat melalui output grafik kurva normal p-plot. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 berikut.

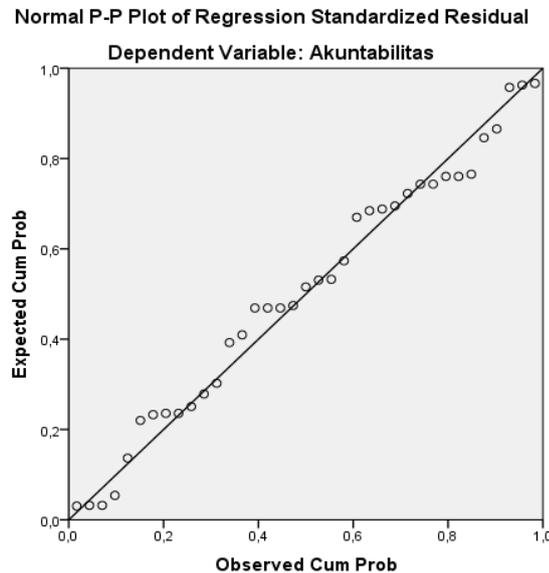


Gambar 1 Histogram

Sumber : Olah Data SPSS 21 For Windows, 2015.

Grafik Histogram pada gambar 1. memperlihatkan penyebaran data (titik) di area histogram yang berbentuk simetris (gambar berbentuk gunung yang simetris), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan tentang apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak, maka dapat dilihat dari Grafik p-plot pada gambar 2. berikut:



Gambar 4. P-Plot

Sumber : Olah Data SPSS 21 For Windows, 2015.

Grafik p-plot pada gambar 2. memperlihatkan penyebaran data (titik) di sekitar garis regresi (diagonal) dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

F. Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis model dan pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil uji statistik menentukan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Analisis Regresi Linear Berganda. Model ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1), kinerja manajerial (X_2), dan pelaporan/pertanggungjawaban (X_3), terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y).

Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 21 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| No. | Variabel | Koefisien Regresi (β) | Nilai F_{hitung} | Sig. |
|-----|----------|-------------------------------|--------------------|------|
|-----|----------|-------------------------------|--------------------|------|

variabel bebas yang paling dominan. Secara teknis pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran, maka hasil pengujian secara parsial (uji-t) dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7
Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

| No. | Variabel | Nilai t_{hitung} | Sig. | Kesimpulan |
|-----|--|--------------------|-------|------------|
| 1. | Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) | 2,445 | 0,020 | Signifikan |
| 2. | Kinerja Manajerial (X_2) | 2,089 | 0,045 | Signifikan |
| 3. | Pelaporan/Pertanggungjawaban (X_3) | 5,328 | 0,000 | Signifikan |
| | $t_{tabel} = 2,035$ $n = 37$ $\alpha = 0,05$ | | | |

Sumber : Data primer diolah, 2015.

Hasil pengujian secara parsial (uji-t) yang dirangkum pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Nilai t_{hitung} variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1), lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,445 > 2,035$) atau nilai signifikansinya (sig.) lebih kecil dari α yang disyaratkan ($0,020 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.
- (2) Nilai t_{hitung} variabel kinerja manajerial (X_2), lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,089 > 2,035$) dan nilai signifikansinya (sig.) lebih kecil dari α yang disyaratkan ($0,045 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja manajerial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.
- (3) Nilai t_{hitung} variabel pelaporan/pertanggungjawaban (X_3), lebih besar dari nilai t_{tabel} ($5,328 > 2,035$) dan nilai signifikansinya (sig.) lebih kecil dari α yang disyaratkan ($0,000 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa pelaporan/pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.

Kriteria dalam menentukan variabel yang dominan merujuk pada variabel yang mempunyai nilai t_{hitung} yang lebih besar dibanding variabel lain dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka variabel pelaporan/pertanggungjawaban (X_3) mempunyai nilai t_{hitung} yang besar jika dibandingkan dengan variabel lain, yaitu sebesar 5,328. Artinya pelaporan/pertanggungjawaban merupakan faktor paling dominan pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.

1. Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

Pengujian secara simultan (Uji-F) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik pengujiannya dilakukan dengan cara membandingkan nilai F

hitung dengan nilai F_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05 dan taraf kepercayaan (*level of confidence*) sebesar 95%.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($47,321 > 2,30$), dan nilai signifikansi hitung (sig) = 0,000 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Hasil ini membuktikan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1), kinerja manajerial (X_2), dan pelaporan/pertanggungjawaban (X_3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi daerah Kabupaten Enrekang.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menemukan bahwa hubungan antara variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1), kinerja manajerial (X_2), dan pelaporan/pertanggungjawaban (X_3) dengan akuntabilitas kinerja instansi daerah Kabupaten Enrekang (Y) adalah sangat erat. 90,7 % variasi naik turunnya akuntabilitas kinerja (Y) dipengaruhi oleh variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1), kinerja manajerial (X_2), dan pelaporan/pertanggungjawaban (X_3). Sedangkan sisanya sebesar 9,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang, sejalan apa yang telah dikemukakan oleh Jhony Saputra (2014), yang menemukan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi berbeda apa yang telah dikemukakan oleh Herawaty (2011) bahwa secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel variabel kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa kinerja manajerial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang, berbeda apa yang dikemukakan oleh Jhony Saputra (2014) bahwa kinerja manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaporan/pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang, berbeda apa yang ditemukan oleh Jhony Saputra (2013) bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi sejalan yang ditemukan oleh Herawaty (2011) bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Parepare.

KESIMPULAN

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.
2. Kinerja manajerial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.
3. Pelaporan/pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.
4. Secara simultan atau bersama-sama variabel kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, dan pelaporan/pertanggungjawaban (X_3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi daerah Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan - Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Andriani, Wiwik dan Hatta, Ermataty. 2012. *Analisi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi Pada Politeknik Negeri Padang)*, (online), Volume 7 No.2.
- Anjarwati, Mei. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, (online), Volume 1 No. 2.
- Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Firdaus A. Rahman. 2009. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 15 No. 1 Juni 2009.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Parepare)*. Skripsi. UNHAS. Sulawesi Selatan.
- Herawati, Netty. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*, (online), Volume 13 No. 2.
- Kenis, Izzettin. 1979. *Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance*. *The Accounting Review*. LIV.4 Hal. 707-721.
- Kurniawan, Albert. 2009. *Belajar Mudah Untuk Pemula*. Yogyakarta: Media Kom.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah* (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang), (online), Volume 1 No. 1.
- Riantiarno, Reynaldi dan Azlina, Nur. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah* (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang), (Online), Volume 3 No. 3.
- Suluh, Alfons Redemptus Benedik. 2012. *Pengaruh Karakteristik Penganggaran Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemerintah* (Studi Pada Satuan Kerja Lingkup Wilayah Kerja KPPN Malang), (online), Volume 1 No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemriksa Keuangan.
- UU No. 17 tahun 2003 tentang perubahan sistem penganggaran dari tradisional budget menjadi penganggaran berbasis kinerja.